

# **BAB I**

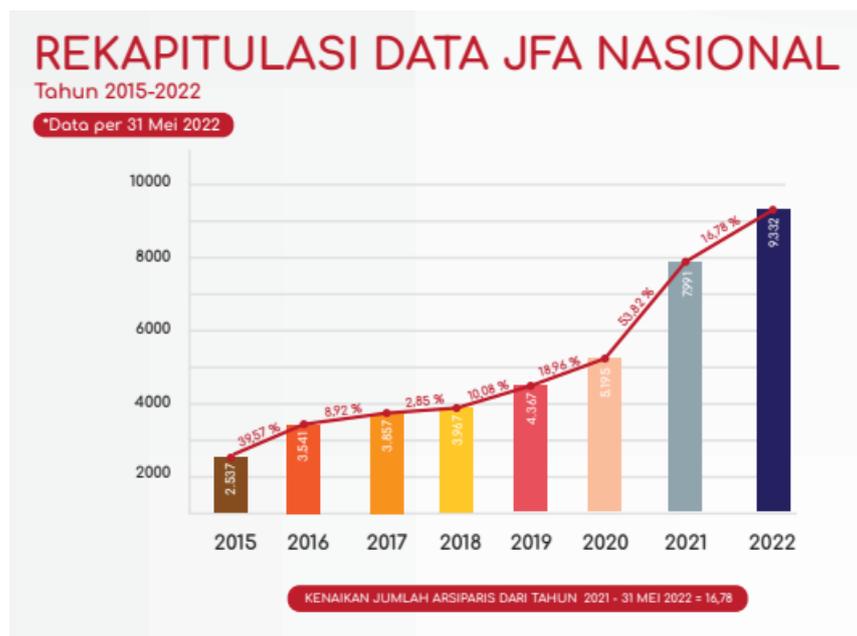
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan arsip merupakan sebuah kegiatan pencatatan informasi yang terkandung di dalam sebuah zaman lalu disimpan sampai dibutuhkan kembali informasi tersebut. Hal, tersebut sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2009 pasal satu tentang kearsipan yang mengatakan bahwasanya arsip merupakan sebuah rekaman peristiwa yang dilalui oleh baik itu di dalam lembaga maupun perorangan yang dimana hal tersebut terjadi dikarenakan mengikuti perkembangan yang ada di dalam bentuk media.

Kegiatan pencatatan arsip merupakan kegiatan mencatat berbagai informasi tersebut lalu mengelompokkan informasi tersebut menjadi satu bagian, seseorang yang mencatat arsip tersebut dikenal sebagai arsiparis. didalam dunia arsip, arsiparis merupakan salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan pengarsipan, hal tersebut dikarenakan arsiparis berperan di dalam mencatat lalu menyimpan informasi yang ada di dalam lembaga maupun organisasi tersebut, sehingga apabila komponen tersebut tidak ada, akan mengakibatkan kegiatan pengarsipan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau bisa dibilang tidak berjalan dengan baik.

Indonesia sendiri, kebutuhan akan arsiparis masih terbilang masih rendah, hal ini di ungkapkan kepala ANRI Dr Mustari Irawan, M.PA., dalam Seminar Kearsipan Nasional 2017 yang mengatakan bahwa kebutuhan akan arsiparis nasional mencapai 143.630 sementara arsiparis yang tersedia pada saat itu hanya berjumlah 3.241 arsiparis (2,25%). Meskipun begitu dari tahun 2017 tersebut hingga di tahun 2022 dapat dilihat bahwasanya ada peningkatan yang cukup di dalam penambahan arsiparis di lingkungan lembaga yang ada di Indonesia, hal ini diperlihatkan oleh ANRI di dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Jumlah Arsiparis dari waktu ke waktu

Sumber: ANRI, Statistik Arsiparis

Gambar tersebut menunjukkan bahwasanya di dalam penerimaan arsiparis di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tahun 2015 sampai tahun 2022 yang bergerak mengalami kenaikan, seperti pada tahun 2015 arsiparis yang tersedia hanya berjumlah 2.537. Lalu pada tahun 2016 arsiparis tersebut mengalami kenaikan sebesar 39,57% sehingga menjadi 3.541 arsiparis, pada tahun selanjutnya jumlah tersebut bertambah menjadi 3.857 sehingga terjadi kenaikan sebesar 8,92 %. Pada tahun 2018 kembali terjadi kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu sebesar 2,85 %, sehingga jumlah arsiparis menjadi 3.967, selanjutnya kembali pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,08 % yang menyebabkan jumlah arsiparis menjadi 4.367, lalu pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 18,96 % yang menyebabkan jumlah arsiparis Kembali menjadi naik menjadi 5.195, selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 53,82 % yang memiliki arti bahwasanya, peningkatan kali ini cukup besar yang mengakibatkan jumlah arsiparis menjadi 7.991, lalu yang terakhir adalah pada tahun 2022 kembali lagi mengalai kenaikan sebesar 16,78 % yang menjadikan total arsiparis yang tersedia di Indonesia menjadi 9.332.

Jumlah tersebut apabila dikaitkan dengan keharusan seberapa banyak arsiparis yang harus dimiliki oleh Indonesia tentu saja masih jauh dari kata mendekati jumlah idealnya yaitu sebesar 143.630 arsiparis, namun meskipun begitu data tersebut menunjukkan bahwasanya perkembangan arsiparis yang ada di Indonesia sedikit demi sedikit bergerak ke arah ideal jumlah arsiparis yang dibutuhkan oleh Indonesia. Selain itu juga menurut ANRI kualitas dari arsiparis yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori sedang yang dimana di dalam nilai 70%, angka ini di dapatkan dari hasil sertifikasi arsiparis yang dilakukan oleh ANRI pada tahun 2023.

Arsiparis di dalam melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan perlu yang dinamakan dengan sebuah kompetensi. Dalam pengelolaan kearsipan yang dimana seorang arsiparis diharuskan memiliki sebuah kompetensi, juga di dalam pengelolaan kearsipan juga dibutuhkan sebuah manajemen kearsipan yang dimana mengatur segala hal yang berkaitan dalam melakukan pengelolaan kearsipan.

Manajemen kearsipan dilakukan agar pengelolaan kearsipan dapat berjalan dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik oleh banyak orang. Namun yang terjadi saat ini adalah dalam melakukan pengelolaan kearsipan dihadapi oleh beberapa kendala. Delova & Nelisa (2018) menjelaskan bahwasanya dalam pengelolaan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto masih kurang dalam melakukan kegiatan tersebut, hal ini ditemukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwasanya pengelolaan kearsipan yang masih belum memadai, yang dimana hal tersebut terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada pengguna arsiparis tersebut berupa menunggu lama dalam menemukan arsip yang diinginkan oleh pengguna, selanjutnya adalah tidak adanya campur tangan dari perkembangan zaman seperti computer dalam melakukan pengelolaan kearsipan sehingga arsip yang diinginkan oleh pengguna dapat ditemukan dengan cepat, dan terakhir adalah sumber daya manusia yang masih belum dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Indonesia saat ini, tata cara pengelolaan kearsipan yang dilakukan oleh pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten masih memiliki kejomplangan dalam hal manajemen kearsipan yang ada di Lembaga tersebut, hal ini dapat terlihat dari bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Hasil pengawasan yang dilakukan oleh ANRI

Sumber: ANRI, Paparan kinerja arsiparis tahun 2023

Dari gambar 1.2 tersebut dapat terlihat bahwasanya di dalam melakukan pengelolaan kearsipan yang dilakukan di dalam instansi cenderung mengarah kearah yang baik yang dimana, dalam penilaian yang dilakukan terhadap beberapa instansi sangat memuaskan sebanyak 18 instansi, memuaskan sebanyak 20 instansi, sangat baik berjumlah 23 instansi, baik berjumlah 15 instansi, cukup 2 instansi, dan kurang berjumlah 1 instansi, yang dimana pengelolaan kearsipan dalam instansi hanya memiliki 3 instansi yang perlu diperhatikan pengelolaannya, selain itu untuk provinsi sendiri, sangat memuaskan berjumlah 4 instansi, memuaskan berjumlah 3 instansi, sangat baik berjumlah 6 instansi, baik berjumlah 12 instansi, cukup berjumlah 2 instansi, kurang berjumlah 6 instansi, sangat kurang berjumlah 1 instansi, sehingga pengelolaan kearsipan yang perlu diperhatikan kembali dalam provinsi berjumlah 9 instansi, sementara untuk kabupaten/kota sendiri cenderung mengarah pengelolaan yang kurang bagus, hal ini ditandai dengan sangat memuaskan berjumlah 6 instansi, memuaskan berjumlah 25 instansi, sangat baik berjumlah 44 instansi, baik berjumlah 59 instansi, cukup berjumlah 42 instansi, kurang berjumlah 81 instansi, sangat kurang berjumlah 165 instansi, dan tidak diberi opini berjumlah 86 instansi, yang

dimana pengelolaan kearsipan yang perlu diperhatikan kembali dalam kabupaten/kota berjumlah 288+86 instansi.

Adanya data tersebut dapat terlihat bahwasanya dalam melakukan pengelolaan kearsipan kabupaten/kota memiliki masalah dalam melakukan kegiatan tersebut, hal tersebut bisa dari arsiparis yang kurang dalam melakukan pengelolaan kearsipan tersebut. Selain itu juga ada beberapa point penting mengapa pengelolaan kearsipan sering kali mengalami kemunduran. Yasa & Juniari (2022) menjabarkan ada beberapa hal mengapa pengarsipan tersebut mengalami kemunduran, hal tersebut antara lain : 1. Manajemen kearsipan yang dilakukan di Undiksha masih sangat lemah, hal ini ditinjau dari manajemen/pengelolaan arsip, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta legalitas formil yang dimiliki Undiksha terkait kearsipan; 2. Urgenitas Arsip pada setiap kegiatan sering terjadi sehingga dapat menyebabkan terjadinya penghambatan dalam proses kegiatan tersebut; 3. Banyak civitas menganggap arsip itu tidak penting akan tetapi pada saat diperlukan sebagai bahan rujukan atau bukti maka arsip itu adalah hal yang sangat penting

Manajemen pengelolaan kearsipan juga mengatur mengenai jumlah arsiparis di dalam melakukan pengelolaan kearsipan di dalam sebuah Lembaga ataupun di dalam sebuah organisasi, Maryanasari & Prasetyawan (2019) menunjukkan adanya kesenjangan antara arsiparis dengan beban kerja yang dimiliki, hal ini dapat terlihat dari data yang dimiliki oleh peneliti yang menunjukkan bahwasanya terdapat target penyelesaian arsip sejumlah 2.000 arsip dalam setahun sehingga idealnya terdapat 7-10 arsiparis dalam mengelola sejumlah arsip tersebut. Selain mengatur jumlah ideal arsiparis dalam sebuah lembaga manajemen kearsipan juga mengatur mengenai beban kerja yang dimiliki oleh seorang arsiparis. Hal ini dilakukan agar seorang tau batasan dalam bekerja, yang dimana dalam hal ini di satukan yang disebut dengan kompetensi.

Kompetensi dalam seseorang arsiparis dapat membantu arsiparis tersebut dalam melakukan pengelolaan kearsipan, Bukhori (2019) menjabarkan berupa kompetensi memiliki pengaruh dalam melakukan

pengelolaan kearsipan yang dimana memiliki pengaruh sebesar 56,4%. Diyanah (2021) menjabarkan bahwasanya dalam profesi arsiparis perlu adanya pengembangan dari kompetensi yang ada saat ini, sehingga dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan bahwasaya arsiparis dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.

Padang merupakan sebuah kota yang merupakan pusat dari Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, sehingga tidak mengherankan kota tersebut memiliki beberapa dinas dalam melakukan pengelolaan sebuah daerah, sehingga dalam melakukan pengelolaan tersebut banyak sekali terlibat surat-surat di dalamnya, namun di dalam melakukan pengelolaan surat-surat tersebut seringkali menjadi masalah. Hal ini diungkapkan oleh bapak Syafriadi S.E selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

Sebelumnya peneliti melakukan pra-penelitian yaitu wawancara yang dimana bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan yang ada pada dinas se-Kota Padang, hasil dari wawancara tersebut beliau mengungkapkan bahwasanya kurangnya SDM yang ada di dalam melakukan pengelolaan kearsipan cukup besar yang dimana dari 52 dinas hanya 33 yang memiliki arsiparis yang ada di Kota Padang. Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dihitung tahun 2022 oleh BKPSDM, didapatkan kebutuhan atas jabatan fungsional Arsiparis sebanyak 83 orang ,dengan kata lain masing-masing dinas harus memiliki dua arsiparis di dalam melakukan pengelolaan kearsipan, Adapun dalam menambahkan arsiparis dalam melakukan pengelolaan kearsipan mengalami kendala, dimana dalam melakukan perekrutan arsiparis adanya proses yang cukup rumit sehingga butuh waktu yang sangat lama dalam mendapatkan arsiparis yang baru. bapak Syafriadi S.E mengatakan bahwasanya sebanyak 33 arsiparis yang direkrut pada tahun 2019 dan 2021 masih menunggu jadwal diklat. Selanjutnya untuk dilakukan uji kompetensi, pada saat ini hanya ada 1 arsiparis yang telah lulus dari semua tahapan tersebut.

Kekurangan arsiparis di dalam melakukan pengelolaan kearsipan juga berpengaruh terhadap beban kerja yang dimiliki oleh arsiparis tersebut yang

dimana berakibat beban kerja arsiparis tersebut yang tidak sesuai dengan Perka Anri Nomor 23 Tahun 2017, namun meskipun begitu beban kerja yang dilakukan oleh arsiparis di dinas se-Kota Padang dilakukan berdasarkan peraturan tersebut. Namun ada beberapa pekerjaan yang dikondisikan dengan keadaan instansi dalam hal ini adalah sarana dan prasarana.

Kekurangan arsiparis juga ikut mempengaruhi pengelolaan kearsipan yang dimana jika dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Syafriadi S.E, dalam setahun pengelolaan surat di setiap dinas mencapai 100.000 ,yang dimana apabila merujuk juga kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.13 Tahun 2016 itu tidak sesuai dengan point-point yang terkandung di dalam peraturan tersebut, yang dimana dengan surat sebanyak tersebut masing-masing dinas haruslah memiliki dua arsiparis agar sesuai dengan peraturan tersebut. Menurut bapak Syafriadi S.E mengatakan bahwasanya penilaian dari bagus atau tidaknya pengelolaan kearsipan di satu dinas dinilai dari arsiparis yang ada di dalam dinas tersebut, dan pengelolaan arsip yang dimulai dari penciptaan arsip hingga penyusutan arsip, serta sarana dan prasarana di dalam pengelolaan kearsipan.

Dari data pra-penelitian menunjukkan bahwasanya arsiparis yang ada di Dinas yang ada Kota Padang memiliki jumlah yang belum maksimal, sehingga pengelolaan kearsipan tidak dapat dimaksimalkan dengan hanya memanfaatkan SDM yang sudah tersedia dan mengembangkan SDM tersebut, dengan demikian penelitian ini berfokus pada kompetensi arsiparis terhadap manajemen kearsipan yang ada di dinas se-Kota Padang, kemudian untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kompetensi arsiparis dengan manajemen kearsipan di dinas se-Kota Padang, Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Korelasi Kompetensi Arsiparis Terhadap Manajemen Kearsipan di Dinas-Dinas Kota Padang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang sudah di paparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Muhammad Hilham, 2024

**KORELASI KOMPETENSI ARSIPARIS TERHADAP MANAJEMEN KEARSIPAN PADA DINAS SE-KOTA PADANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### **1.2.1 Rumusan Masalah Umum**

Apakah Terdapat korelasi kompetensi arsiparis terhadap manajemen kearsipan di Dinas se-Kota Padang?

### **1.2.2 Rumusan Masalah Khusus**

1. Bagaimana kompetensi arsiparis di Dinas se-Kota Padang?
2. Bagaimana manajemen kearsipan di Dinas se-Kota Padang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Penelitian Umum**

Mengetahui korelasi kompetensi arsiparis terhadap manajemen kearsipan di Dinas se-Kota Padang

### **1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus**

1. Mengetahui kompetensi Arsiparis di Dinas se-Kota Padang
2. Mengetahui manajemen kearsipan di Dinas se-Kota Padang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Harapan Penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu di dalam bidang kearsipan serta pengembangan SDM yang akan digunakan di dalam kegiatan kearsipan.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti: Sebagai referensi di dalam melakukan pengimplementasian dalam dunia kearsipan yang akan datang.
2. Bagi Pengelola: Sebagai bahan rujukan mengenai pentingnya kualitas Arsiparis di dalam melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan.

3. Bagi penelitian selanjutnya: Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan di dalam penelitian selanjutnya, terutama mengenai korelasi Arsiparis dengan pengelolaan Kearsipan.

### **1.5 Struktur Organisasi Penulisan**

Sistematika penulisan untuk penelitian Korelasi Kompetensi Arsiparis Terhadap Manajemen Kearsipan di Dinas se- Kota Padang ini disusun dalam lima bab, Adapun gambaran dari struktur organisasi skripsi yang terkandung dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian yang akan dilakukan, seperti fenomena dari subject penelitian, pendapat para ahli mengenai subject yang akan dituju, serta bahan pendukung mengenai subject tersebut, selain itu juga berisikan mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut bagi di masa yang akan datang.

#### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai segala hal yang berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian tersebut, mulai dari pendapat ahli mengenai kedua subject yang akan diteliti serta bahan pendukung lainnya mengenai subject yang ada.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan mengenai rangka penelitian yang dimulai dari penyusunan untuk pengambilan data seperti Jenis sampel yang akan diambil dan lain sebagainya, selain itu juga membahas mengenai Teknik pengambilan data yang akan digunakan , hingga pengelolaan data untuk penelitian tersebut.

#### **BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai hasil yang di dapatkan dari pengambilan data sebelumnya lalu melakukan pembahasan dari data yang sudah diolah sebelumnya, dan juga untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

#### **BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini berisikan hasil kesimpulan yang di dapatkan dari pengelolaan data yang sudah dilakukan sebelumnya, serta jawaban dari pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, selain itu juga berisikan juga saran dari penelitian tersebut untuk penelitian yang dilakukan.